KEMBALINYA JATI DIRI KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA INDONESIA

Aditya Ramadhan¹, Fito Alfiansyah², Rony Edward Utama

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: ar5569174@gmail.com , fitoalfiansyah2002@gmail.com,
ronyedward60@gmail.com

Abstrak

Negara harus bisa meningkatkan pendapatan ekonomi supaya Negara tersebut dapat menjadi Negara yang bisa bertahan bahkan berkembang menjadi lebih maju agar dapat bersaing dengan Negara – Negara lain yang ada di dunia ini. Lalu bagaimanakah cara suatu Negara dapat meningkatkan pertumbuhannya? Salah satu cara Negara dapat mengembangkan ekonominya ialah dengan cara mengelola dan memperhatikan koperasi dengan baik sehingga koperasi dapat menjadi tempat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Karena koperasi dapat berperan sebagai jalan untuk meningkatkan perekonomian dari suatu Negara apabila koperasi bisa di kelola dengan baik. Maka dari itu, koperasi harus sangat diperhatikan dan juga terus dikembangkan agar koperasi dapat tetap ada dan tetap berjalan sehingga peluang meningkatnya pertumbuhan pendapatan dari suatu Negara dapat terlaksana.

Kata Kunci: Koperasi, Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, selkaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata-mata amanat Pasal 33 UUD 1945 (normatif), melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumberdaya material saja tetapi juga sumberdaya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota, Tuntutan koperasi kembali ke jati dirinya, dilakukan untuk mewujudkan dan membangun perilaku organisasi koperasi yang sehat dan mantap, dengan tetap berpegang teguh pada

jatidirinya. Dalam hubungan itulah perlu dipertanyakan: apa sebenarnya yang dimaksud dengan koperasi kembali kepada jatidirinya? Apakah itu berarti selama ini koperasi telah tumbuh tanpa mendasarkan pada jati diri yang sebenarnya dan apakah koperasi tersebut dapat diharapkan mampu kembali pada jatidirinya? Kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari pembahasan Bab 2 di muka menunjukkan bahwa tanpa tersedianya informasi tentang kemampuan koperasi mewujudkan jatidirinya, yang berarti apabila koperasi tidak mampu lagi menempatkan identitas sesungguhnya, itu berarti bahwa prestasi dari rangkaian kegiatan proses pembangunan dan pengembangan koperasi di masa mendatang tidak mungkin akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi jajaran perkoperasian Indonesia. Sebagaimana diketahui identitas (ciri) organisasi koperasi merupakan wujud indikator status organisasi bersangkutan dan sekaligus menjadi unggulan organisatoris yang membedakannya (distinctive) dari lembaga-lembaga atau pelaku-pelaku ekonomi lain. Demikian pula, seandainya prestasi dimaksud dapat diwujudkan akan tetapi jajaran koperasinya tetap tidak mampu menunjukkan jatidiri yang sebenarnya maka sudah dapat diramalkan bahwa benar-benar tidak akan banyak berbeda, dari kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang dijumpai saat ini, bahkan mungkin juga sama dengan kondisi yang sifatnya set back, dan jelas merugikan rangkaian proses pertumbuhan perkoperasian Indonesia sendiri. Koperasi memang bukan satu-satunya lembaga yang berpotensi untuk mendukung pengembangan ekonomi yang paling sesuai bagi kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Tetapi koperasi memiliki kelebihan yang cukup penting dan sangat besar artinya dalam mengembangkan potensi ekonomi terutama untuk kalangan yang menguasai sumberdaya materail dan pengetahuan yang terbatas tersebut, karena dalam koperasi anggota selain sebagai pemilik (owners) dan sekaligus juga berperan sebagai pemakai (users). Karena dalam koperasi terkandung unsur sosial yang menyerupai ideologi, maka berbagai penafsiran koperasi mudah dimasuki oleh unsur-unsur non ekonomi (terutama politik). Oleh sebab itu dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu di sepakati berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial.

1. Pengertian Koperasi

Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa : Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi

permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi 2) Menurut International Cooperative Alliance (ICA) Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis, 3) Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat 1a.) untuk mencapai kesejahteraan (pasal 3) memodali bersama (pasal 4.1) dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b) orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bersangkutan (pasal 17 ayat 1) 4) Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000), salah seorang pakar koperasi yang pemikirannya perlu dipahami mendefinisikan koperasi sebagai Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

2. Nilai – Nilai Koperasi

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh bentuk badan usaha ekonomi lainnya, Dalam hal ini Ibnu Soedjono (1992) berpendapat bahwa dalam koperasi terkandung asas menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.¹ Lebih jauh dijelaskan oleh Soedjono bahwa “Prinsip menolong diri sendiri (self-help) percaya pada diri sendiri (self-reliance) dan kebersamaan (Cooperation) dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Sinerji tersebut baru akan terbentuk jika para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai”

3. Prinsip – Prinsip Koperasi Di Indonesia

¹ Rasyidi A. Mudemar. “MENGEMBALIKAN KOPERASI KEPADA JATIDIRINYA BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA”. Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 1. Pendidikan Perkoperasian
 2. Kerja sama antar koperasi

Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya:

- a. Sifat kesuka relaan dalam keanggotaan koperasi.
Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sifat kesuka relaan ini juga mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- b. Adanya prinsip demokrasi.
Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukn atas kehendak keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti dirumuskan oleh International Cooperative Alliance (I.C.A) ata aliansi koperasi internasional.

- c. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.
Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi.
- d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.
Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- e. Prinsip Kemandirian dari koperasi.
Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.
- f. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar koperasi.

4. Peran Dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi Koperasi

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Peran dan Tugas Koperasi:

- a. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
- b. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia

c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan di berbagai negara besar di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, 80% listrik di wilayah perdesaan disediakan koperasi. Tiga perempat produk susu yang dikonsumsi dunia berasal dari koperasi peternak sapi perah di Australia dan Selandia Baru. Di Indonesia, meskipun konsep koperasi sudah dipayungi oleh undang-undang, tetapi tetap saja keberadaan koperasi belum bisa berjalan secara efektif. Dalam era otonomi daerah setiap daerah terutama masyarakat desanya harus memiliki rasa percaya diri bahwa melalui organisasi koperasi kegiatan ekonomi rakyat dapat diperhitungkan dan diandalkan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi dirinya, meninggalkan sifat-sifat koperasi sebagai koperasi pengurus menjadi koperasi anggota dalam arti kata yang sebenarnya.² Jika koperasi benar-benar merupakan koperasi, tidak akan ada program/kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan anggota. Dengan perkataan lain setiap 'produk' atau kegiatan usaha koperasi harus berdasarkan 'restu' atau persetujuan anggota dalam koperasi tersebut. Koperasi tidak berhak untuk mencari keuntungan karena anggotalah yang mempunyai hak untuk mencari keuntungan yang harus menjadi lebih besar dengan bantuan organisasi koperasi. Bersamaan dengan pembaruan praktik berkoperasi seperti itulah, yang kita harapkan akan lahir dan berkembang ilmu koperasi, yang merupakan 'ilmu ekonomi baru' di Indonesia, yang merupakan ilmu sosial ekonomi (social economics). Ilmu ekonomi baru ini merupakan ilmu ekonomi tentang bagaimana bekerja sama (cooperation) agar masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih adil, bukan sekadar masyarakat yang lebih efisien (melalui persaingan/kompetisi) yang ekonominya tumbuh cepat. Dalam tatanan ekonomi baru pihak pemerintah termasuk juga pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menjaganya agar selalu dipatuhi aturan main dalam berekonomi yang akan menghasilkan sebesar-besar kemakmuran ekonomi rakyat. Otonomi daerah yang merupakan simbol kewenangan daerah untuk mengelola sendiri ekonomi daerah harus dilengkapi dengan desentralisasi fiskal yang diatur secara serasi oleh pemerintah daerah bersama DPRD, kesemuanya diarahkan pada kesejahteraan rakyat yang maksimal, agar rakyat pun dapat merasakannya dengan optimal. Selain itu para pengelola koperasi di Indonesia, yang mewakili unsur gerakan yang berbasis pada masyarakat pun tentu harus punya kebijakan dan strategi lain untuk mengembangkan koperasi. Campur tangan pemerintah melalui berbagai aturan dan kebijakan bahkan saat pembentukan pengurus pada

² Zulhartarti, Sri. "PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA". IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

lembagalembaga koperasi dari pusat hingga kabupaten praktis masih terpusat kepada kepentingan penguasa. Artinya pemerintah masih memiliki kekuasaan besar dalam membina koperasi yang pada akhirnya melenceng dari tujuan utama koperasi. Tentunya hal ini merupakan motivator bagi para anggota yang bergabung dalam koperasi untuk menghadapi persaingan dan diperlukan insentif individu sudah tidak dapat dielakan. Sehingga koperasi diharapkan akan mampu memainkan perannya cari kegiatan yang kecil saja sesuai dengan kondisi pasar dilingkungannya. Dengan demikian koperasi dapat bertumbuh, berkembang secara efisien dengan tetap memainkan perannya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Presiden menegaskan bahwa koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang makin penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan, terlepas dari makin globalnya perekonomian dunia. Meskipun seolah-olah kita hidup di era globalisasi tapi justru peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah makin penting di masa depan. Jika perekonomian nasional tidak memberi tempat untuk berkembang koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah maka upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhambat. Oleh karena itu, solusinya adalah makin ke depan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah makin dikembangkan ke seluruh tanah air. Keberhasilan Indonesia untuk dapat bertahan dari dampak krisis keuangan global yang tengah melanda negara-negara barat tidak terlepas dari peran koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Karena menilik dari perkembangan koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah lima tahun terakhir maka berarti arah dan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah tepat.

Kesimpulan

Koperasi adalah merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yaitu dalam wadah koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

4 Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Dengan melaksanakan dan menerapkan keseluruhan dari peran dan tugas serta prinsip tersebut diharapkan perkoperasian di Indonesia dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Daftar Pustaka

Rasyidi A. Mudemar. *"MENGEMBALIKAN KOPERASI KEPADA JATIDIRINYA BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA"*.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/viewFile/640/611>. Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Zulhartarti, Sri.

"PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA".

<https://media.neliti.com/media/publications/218156-peranan-koperasi-dalam-perekonomian-indo.pdf>. IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 2 No10 Tahun 2023
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 2 No10 Tahun 2023
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359